

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PERAN KPU
PASCA PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024
TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL
DAN PEMILU LOKAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Aisyah Alamudi

NIM.05010422004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Alamudi
NIM : 05010422004
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Peran KPU Pasca
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan
Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 Februari 2026

Yang menyatakan,



Aisyah Alamudi
NIM. 05010422004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aisyah Alamudi

NIM : 05010422004

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Peran KPU Pasca
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan
Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Februari 2026
Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aisyah Alamudi

NIM. : 05010422004

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Peran KPU Pasca Putusan Mk Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal Di Indonesia

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji III

Dr. Mohamfad Isfironi, M.H.I

NIP. 197008112005011002

Penguji II

Dr. H. Syamsuri, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

Penguji IV

Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.

NIP. 199901012025052004

Surabaya, 5 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Agivah Musla'ah, M.Ag.

NIP. 196303271990032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aisyah Alamudi
NIM : 05010422004
Fakultas/Jurusan : FSH/Hukum Tata Negara
E-mail address : aisyahalamudi04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah Terhadap Peran KPU Pasca Putusan Mk Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal Di Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 April 2026

Penulis

(Aisyah Alamudi)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal membawa transformasi fundamental dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Putusan ini mengubah format pemilu serentak lima kotak menjadi dua gelombang terpisah dengan jeda waktu 2-2,5 tahun. Perubahan ini menimbulkan implikasi signifikan terhadap peran dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang independen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 1) Mengetahui Peran KPU Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-X XII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dan 2) Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Peran KPU Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer meliputi Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Kemudian bahan sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah yang memiliki kesinambungan dengan topik permasalahan yang dikaji penulis. Analisis dilakukan secara deduktif, penelitian dapat secara sistematis menyelaraskan antara teori *fiqh siyāsah dustūriyah*, teori kewenangan dan teori kedaulatan rakyat oleh KPU terkait putusan MK tersebut, sehingga hasilnya menjadi analisis yang terstruktur dan logis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran KPU pasca putusan mengalami transformasi signifikan dalam pengelolaan dua siklus pemilu terpisah, mencakup penyesuaian kewenangan operasional, pengelolaan sumber daya, sistem administrasi, koordinasi regulasi, dan manajemen risiko. Dalam Tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* menilai peran KPU sah dan selaras dengan prinsip *syura* (musyawarah), *adl* (keadilan), serta amanah, sepanjang berorientasi maslahat umat.

Saran penulis dari penelitian ini penyesuaian regulasi undang-undang sangat diperlukan dengan adanya putusan tentang pemisahan pemilihan umum. Demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara adil, transparan, dan sesuai dengan amanat konstitusional. Evaluasi secara berkala terhadap implementasi pemilu nasional dan lokal, dengan menerapkan nilai-nilai *fiqh siyāsah* untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip *al-maslahah* (kepentingan umum)

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SKRIPSI..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah..... | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian | 11 |
| F. Penelitian Terdahulu | 12 |
| G. Landasan Teori..... | 17 |
| H. Definisi Operasional | 20 |
| I. Metode Penelitian | 21 |
| BAB II KONSEP <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i>, TEORI KEWENANGAN DAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT..... | 26 |
| A. <i>Siyāсах Dustūriyah</i> | 26 |
| 1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dustūriyah</i> | 26 |
| 2. Prinsip-Prinsip <i>Siyāсах Dusturiyah</i> | 35 |
| B. Teori Kewenangan..... | 40 |
| C. Teori Kedaulatan Rakyat | 47 |
| BAB III PERAN KPU PASCA PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL. 53 | 53 |
| A. Deskripsi Putusan | 53 |
| B. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Menurut Teori Kedaulatan Rakyat | 60 |

| | |
|--|------------|
| C. Peran KPU Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal | 65 |
| BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP PERAN KPU PASCA PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL | 80 |
| A. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> | 80 |
| B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Peran KPU Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 | 82 |
| BAB V PENUTUP..... | 88 |
| A. Kesimpulan..... | 88 |
| B. Saran | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 90 |
| LAMPIRAN..... | 97 |
| BIOGRAFI PENULIS..... | 104 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Skema waktu pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal..... | 78 |
| Tabel 2 Peran KPU Sebelum dan Pasca Putusan..... | 80 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Deliarnoor, Nandang Alamsah. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. UNPAD Press, 2017.

Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. edisi ke dua. Prenadamedia Group, 2024.

Sopacua, Margie Gladies. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. ed 1. Bandung: Widina Media Utama, 2020.

Sulaksono. *Terori-Teori Administrasi Negara*. CV. Jakad Media Publishing, 2022.

II. Jurnal dan Artikel

A. Fikri Ainurrizqi, dan Oman Sukmana. "Partisipasi Politik Masyarakat di Negara Demokrasi: Studi Kasus Pemilu 2024 di Indonesia." *Journal of Society Bridge* 3, no. 2 (2025): 72-83. <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.74>.

Afifah Aminudin, Hauwin Nur. "Rekayasa Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxiii/2024 oleh Lembaga Legislatif Perspektif Siyasaah Dusturiyah." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2025.

Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, dan Rahmah Meladiah. "Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada." *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 37–45.

Ahmad Syukron, Abdullah Safe, Iwan Satiri, Muhammad Irawan Taqwa. "The Relationship Between Islam and the State in the Qur'an: Sayyid Qutb's Perspective on Islamic Political Governance", *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 8, No 2, (2024).285-300

Al Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2020.

Almalibari, Khotob Tobi, Abdul Aziz, dan Adrian Febriansyah. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>.

- Almunawar, Agil. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal.” *Jurnal Hukum Bekeadaban*, no 1. 2025.
- Arfiani, Syofirman Syofyan, Suci Delyarahmi, dan Indah Nadilla. “Urgensi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 212–234. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>.
- Asmin, Benedict Artika Sari, dan Elissa Virginia. *Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 Dan Kontribusi Judicial Review Terhadap Reformasi Pemilu*. 4, no. 3 (2024).
- Asriana, Sri, Rosmini, dan Ine Ventyrina. “Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah.” *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 20–33. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586>.
- Atma Hajri, Wira, Heni Susanti, Ardiansyah Ardiansyah, dan Nabila Nabila. “Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan Konsekuensinya di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Selat* 10, no. 2 (2023): 165–178. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5456>.
- Baehaki, Kadimuddin. “Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024.” *Jurnal Media Hukum* 13, no. 2 (2025): 265–274.
- Biroroh, Ta'mirotul, dan Muwahid Muwahid. “Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 365-384. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.365-384>.
- Debora Moningka, Casya Zephania, Tommy Ferdy Sumaku, dan Donna Okthalia Setiabudhi. “Tinjauan Hukum Terhadap Keseimbangan Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.” *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 13 No.3 (2025).
- Defretes, Dwi Astrianti, dan Kristoforus Laga Kleden. “Efektivitas Pemilihan Umum Serentak 2024.” *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 2 (2023): 49–58. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>.
- Hadi, Heri Kurniawan. “Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa, Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut Siyasah Dusturiyah.” *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS)*, 2021.

- Hasibuan, Syaiful Asmi. "Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan dengan Negara Demokrasi." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 602–609. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174>.
- Hawari, Nadirsah Hawari. "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah Dar' u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 10, no. 1 (2024): 72-86. <https://doi.org/10.37058/jipp.v10i1.10448>.
- Hidayat, Taufik. "Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019." *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022.
- Huroiroh, Ernawati, Titik Triwulan Tutik, dan Dossy Iskzar Prasetyo. "Implications of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 on the Separation of DPR and DPRD Elections on the Electoral System in Indonesia" *Justitia Hukum* (2025): 143-161.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 135–152. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Indriyani, Vera Agus. "Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyasa." *UIN Raden Intan Lampung*, 2018.
- Jauhari, Achmad Hasfa. "Demokrasi dan Pemilu Indonesia." *IJK STRADA Indonesia*, advance online publication, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wke9x>.
- Justitia, Kombad. "Revolusi Desain Pemilu Indonesia: Kajian Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah." *Kombad Justitia*, 2025. <https://www.kombadjustitia.com/2025/07/revolusi-desain-pemilu-indonesia-kajian.html>.
- Kadenun. "Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijaksanaan Dalam Pemerintahan Khulafaurrasyidin." *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 1, no. 2 (2021): 1–27. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.747>.
- Kadenun, H. "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam." *Qalamuna* 11, no. 2 (2019).
- Karo-Karo, Mursyidan Muzadi, dan Irwansyah. "Pemisahan Waktu Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan MK No. 135/Puu-Xxii/2024: Kajian atas Prinsip

Efisiensi dan Kedaulatan Rakyat Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Studi Keislaman* VOL. 5, No. 3, November (2025).

Muhammad Fadhli. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.” *Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 1, no. 1 (2023): 45. <https://doi.org/10.61842/swq/v1i1.3>.

Muhammad Helmi Fahrozi, Syifa Silvana, dan Aisyah Nurhalizah, “Upaya Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Hukum Formil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” *KNAPHTN*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 332-400.

Mustajib. “Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Legislatif.” *JURNAL RECHTENS* 7, no. 2 (2018).

Muzaki, Achmad, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, dkk, "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", *Jurnal Pascasarjana IAIN Kediri*, vol 7, (November 2024). 35-52

Nugroho, Dian Ade, dan Retno Mawarini Sukmariningsih. “Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis.” *Jurnal JURISTIC* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>.

Prayudi, Prayudi. “Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal [Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 12, no. 1 (2021): 67–84. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.1768>.

Pulungan, Muhammad Choirullah, Mudiyati Rahmatunnisa, dan Ari Ganjar Herdiansah. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020): 251–272. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>.

Purnamawati, Evi. “Perjalanan Demokrasi di Indonesia.” *Solusi* 18, no. 2 (2020): 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>.

Putra, Zulfikar. “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.” *Universitas Sembilanbelas November Kolaka* 2, no. 1 (2024).

Putra, Zulfikar, dan Ridwan Umpi. “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum*

- Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 464–65.
<https://doi.org/10.55292/ezrt0491>.
- Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, dan Wismanto Wismanto. “Fiqh Siyasah dalam Pembelajaran Islam.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 218–230.
<https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>.
- Putri, Mutiara. *Integrasi Fiqh Siyasah dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat: Studi Terhadap Pemilu Di Indonesia*. no. 1 (2025): 98-112.
- Putri, Sri Ujjana, dan Nita Zikriani. *Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025*. 1, no. 1 (2025): 113-137.
- Rahmah, Puja. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Al- Mawardi Dan Relevansinya Bagi Tata Kelola Pemerintahan Islam.” *IBTIKAR* 2, no. 1 (2025): 42-51.
- Rahmat, Abdul Latif, dan Kholid Mawardi. “Sistem Pemerintahan, Politik dan Peran Ahlu Hall Wal ‘Aqdi pada Masa Khulafaur Rasyidin.” *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2023): 30–41. <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3708>.
- Rinaldo, M. Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Salam, Agus. “Kedaulatan (Sovereignty) Dalam Politik Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suatu Perbandingan).” *Moderate el-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 2 (2022): 103–127.
- Salman Abdul Muthalib, Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an.” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* Vol. 4, No. 2, hlm. 150–166 (Desember 2019).
- Sari, Putri Yunita, dan Siti Tiara Maulia. “Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia.” *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 137–142.
<https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.
- Seleky, Adolop, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Patrick Corputty. “Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022): 44–59.
<https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5928>.

Situngkir, Danel Aditia. *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum*. 5 (2023): 10–12.

Sri Warjiyati. “Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia.” *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* Vol. 08, No.1 (2020): January, hlm. 24-37 Social and Political Science Faculty, (2020): 24–37.

Sulistiono, Sandy, dan Widyawati Boediningsih. “Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia.” *Jurnal Rectum* 5, no. 3 (2023): 333-345. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.

Utami, Beta. “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS)*, 2022.

Wijaya, David Doresta, dan Nurul Mubin. “Teori Kedaulatan Negara.” *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 114–121. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>.

Zainurahman, Moch Fiqri, dan Khulaila Inda Fikriyah. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD*. 5, no. 2 (2025).

III. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024\

IV. Surat Kabar

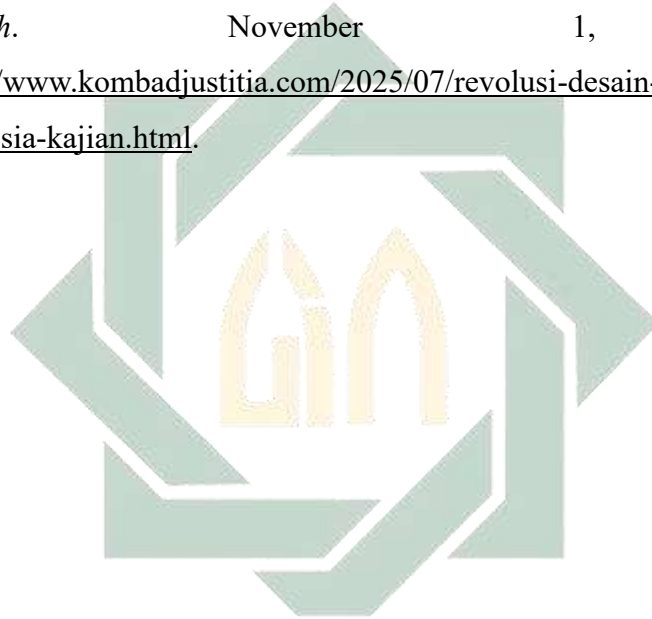
NasDem: Putusan MK 135 Pencurian Kedaulatan Rakyat. t.t. Diakses 12 Februari 2026. <https://partainasdem.id/2025/06/30/nasdem-putusan-mk-135-pencurian-kedaulatan-rakyat/>.

KPU. “Putusan MK Bagian Perbaikan Pemilu.” Diakses 9 September 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13029/putusan-mk-bagian-perbaikan-pemilu>.

LAB 45. “Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kontroversi dan Desain Rekayasa Politik.” <https://www.lab45.id/>. Diakses 1 April 2026. <https://www.lab45.id/detail/342/putusan-mk-no-135-puu-xxii-2024-kontroversi-dan-desain-rekayasa-politik>.

“Menata Ulang Pemilu Nasional dan Lokal: KPU Wajib Patuh pada Putusan MK 135/PUU-XXII/2024.” *Berita Rakyat Terdepan*, t.t. Diakses 1 April 2026. <http://www.baraktime.com/2025/06/menata-ulang-pemilu-nasional-dan-lokal.html>.

Revolusi Desain Pemilu Indonesia: Kajian Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Daerah. November 1, 2025. <https://www.kombadjustitia.com/2025/07/revolusi-desain-pemilu-indonesia-kajian.html>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A